

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Abu Ubayd al-qasim ibnu salam, 1986, *Kitab al-amwal*, dar al-kutub al-Ilmiyat, bairut, hal 286-313

Ali Engineer, 1999, *Islam dan Teologi Pembebasan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 110-112

Arba, H.M. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. Hal 149-150

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia; Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jilid 1 Hukum Tanah Nasional*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2005, hlm 288

Boedi Harsono, 2007, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, hlm.283

Boedi Harsono, Dalam Umar Ma'ruf, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah & Asas-Asas Hukum Pertanahan*. Penerbit Unissula Press, Semarang, 2014, hlm. 21.

Florianus SP Sangsun, 2007, *Tata Cara Mengurus Sertipikat Tanah*, Visimedia, Jakarta, hlm.18

Jacob Vredenbergt, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Jakarta, Gramedia, 1981.

Majone dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2002),

M.Mahfudz MD, Dalam Umar Ma'ruf, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah & Asas-Asas Hukum Pertanahan*. Penerbit Unissula Press, Semarang, 2014, hlm. 20

Moempuni M. Marwoto, Dalam Umar Ma'ruf, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah & Asas-Asas Hukum Pertanahan*. Penerbit Unissula Press, Semarang, 2014, hlm. 65

Muhammad Abu Zahrah, 1996, *Al-Milkiyah wa Nazariyah al- Aqd fi al-syariah al-islamiyah*, Dar al-fikr al-araby, Kairo, hlm.107

Muhammad Baqr Sadr, 1981, *Iqtisaduna*, dar al-ta'rif lil al-mathbuat, bairut, hlm. 333-340

Muhammad Lutfi Farhat, 1986, *Maalim Nazariyat Iqtisadiyah Jadidat*, Jamiat al-Fatih, kairo, hlm.89

Musatafa Ahmad al-zarqa, 1986, *Al-madkal al-fiqh al-amm*, Dar al-fikr, bairut, hlm. 284

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm.37, 2005.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 141. 2006.

Rida Ahida, 2008, *Keadilan Multikultural*, Ciputat Press, Jakarta, hlm. 103-109

Rusmadi, Murad, *Administrasi Pertanahan*, Mandar Maju, Bandung, 1997.

Shallman & Darsono, *Hukum Agraria*, Surakarta: Fakultas Hukum Unuversitas Muhammadiyah Surakarta, hal.19, 2017.

Soegiarto, 1976; Dahuri et al, 2001

Sudargo Gautama, Dalam Umar Ma'ruf, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah & Asas-Asas Hukum Pertanahan*. Penerbit Unissula Press, Semarang, 2014, hlm. 19

Supriadi, *Hukum Agraria*, (Jakarta: Sinar Rafika, 2007), halaman 3

Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Kencana Prenamedia Grup, 2010, hlm. 14

Waskito & Hadi Arnowo, *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang*, Jakarta: Kencana, hal.16, 2017.

Yahya dan Fathurrahman, 1986, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Pt. Al- Ma'arif, Jakarta, hlm. 347

## B. JURNAL

Abdoel Hameed M. Bashir, 2002, "*Property Rights, Institution and Economic development in islamic prespective, humanumics Vol.18* , hlm.76

Adrian Sutedi, Dalam Nurmalia Ika Widiyari, *Tinjauan Yuridis Tentang Perolehan Hak Atas Tanah Bagi Perempuan WNI*, Jurnal Akta Vol. 4. No. 1, Semarang, Maret 2017: 25 - 28

Boedi Harsono, Dalam Yona Yonanda Soly & Yuwono Prianto, *Kesadaran Hukum Masyarakat Atas Penetapan Batas Penguasaan Tanah/Ruang di Wilayah Pesisir dan Pantai*, Volume 2, No. 1, Juni 2017, hal 151

Diponegoro Law Review, Volume 5 Nomor 2 Tahun 2016.

Garrick Small, 2003, *The Dimensions of Human and Property*" *Pacific Rim Property Research Journal* Vol. 9 No. 3, hlm..3

Jurnal ilmu Hukum '*Status Kepemilikan Tanah Hak Konversi Hak Barat Berdasarkan UU No 5*

Musta'in, *implementasi pendaftaran sertipikat hak milik atas tanah dalam pembagian waris dan permasalahannya di kantor pertanahan kota semarang*, Jurnal Akta Vol. 4. No. 2, Semarang, juni 2017: 134 - 140

Nadya Karina,).Jurnal Diponegoro Law Review, Volume 5 Nomor 2 Tahun 2016,hal 2

*Pakai di Kota Tegal (Studi Kasus Putusan MA Nomor : 1097k/Pdt/2013)*.Jurnal.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 573), Dalam Yona Yonanda Soly & Yuwono Prianto, *Kesadaran Hukum Masyarakat Atas Penetapan Batas Penguasaan Tanah/Ruang di Wilayah Pesisir dan Pantai*, Volume 2, No. 1, Juni 2017, hal 153

*Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok agrarian dihubungkan dengan PP No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah*, , Volume 3 No 1, hal.2.

Ulfia Hasna, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 No 1, hal.2

Yona Yonanda Soly & Yuwono Prianto, *Kesadaran Hukum Masyarakat Atas Penetapan Batas Penguasaan Tanah/Ruang di Wilayah Pesisir dan Pantai*, Volume 2, No. 1, Juni 2017, hal 152

Yona Yonanda Soly & Yuwono Prianto, *Kesadaran Hukum Masyarakat Atas Penetapan Batas Penguasaan Tanah/Ruang di Wilayah Pesisir dan Pantai*, Volume 2, No. 1, Juni 2017, hal 153

Yona Yonanda Soly & Yuwono Prianto, *Kesadaran Hukum Masyarakat Atas Penetapan Batas Penguasaan Tanah/Ruang di Wilayah Pesisir dan Pantai*, Volume 2, No. 1, Juni 2017, hal 158

### **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Lampiran Perda Perubahan *RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021 Bab 2 Hal 1*

Lampiran Perda Perubahan *RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021 Bab 2 Hal 9-12*

Lampiran Perda Perubahan *RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021 bab 2 Hal 12-14*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang *Pendaftaran Tanah*, 2016.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang nomor 8 tahun 2007 tentang *Pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil di kabupaten Rembang*

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang nomor 14 tahun 2011 pasal 8 tentang *rencana tata ruang wilayah kabupaten rembang tahun 2011-2031*

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang nomor 14 tahun 2011 pasal 41 tentang *rencana tata ruang wilayah kabupaten rembang tahun 2011-2031*

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang nomor 14 tahun 2011 Pasal 53 tentang *rencana tata ruang wilayah kabupaten rembang tahun 2011-2031*

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang nomor 14 tahun 2011 Pasal 54 tentang *rencana tata ruang wilayah kabupaten rembang tahun 2011-2031*

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang nomor 14 tahun 2011 Pasal 55 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten rembang tahun 2011-2031

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang nomor 14 tahun 2011 Pasal 56 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten rembang tahun 2011-2031

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang nomor 14 tahun 2011 Pasal 57 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten rembang tahun 2011-2031

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang nomor 14 tahun 2011 Pasal 58 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten rembang tahun 2011-2031

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang nomor 14 tahun 2011 Pasal 59 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten rembang tahun 2011-2031

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nomor : 17 Tahun 2016 pasal 4 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau – pulau Kecil

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nomor : 17 Tahun 2016 pasal 5 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau – pulau Kecil

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nomor : 17 Tahun 2016 pasal 6 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau – pulau Kecil

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nomor : 17 Tahun 2016 pasal 8 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau – pulau Kecil

Peraturan RT/RW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031

Undang-Undang (UU) No. 27 Tahun 2007

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil

#### **D. INTERNET**

Anwar Hidayat Blog, *Penjelasan dan Pengertian Metode Penelitian*, artikel : <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html> , diakses pukul 14.05 WIB ,pada 28 September 2020 .



<https://www.Badan Pusat statistik Kabupaten Rembang>

<https://www.Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional>

<https://rembangkab.go.id/geografis/>

